

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Andy Hartanto, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.P. Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung, Bagian I.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisa tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Budi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung, Djambatan.

.....1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.

Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*, Yogyakarta, Legality.

E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Jakarta. Kencana.

Effendi Perangin, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung, Mandar Maju.

- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harun Al-Rasyid, 1987, *Sekilas tentang jual Beli Tanah*, Cetakan I, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Bandung: Kaifa Mizan Pustaka.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- K. Bertens, 1997, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuat Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administerasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keduabelas, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
-, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
-, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

B. JURNAL

A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdara Belanda (alih bahasa)*, oleh M. Isa, Jakarta, Intermasa.

Imam Surya Saputra, Ilyas Ismail, Darmawan, 2020, *Akibat Hukum Adanya Penyalahgunaan Keadaan Pada Perjanjian Jual beli Tanah di Banda Aceh*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta, Komisi Hukum Nasional.

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2009, *Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegheid*, Jurnal Creipdo, Volume 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Mohammad Kenny Alwen, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019.

Pieter Latumeten, *Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia Kebatatan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Surabaya, 28 Januari 2009,.

Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.

Sidharta B.A., 2015, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Veritas et Justitis.

Tulus Pujiono, 2006, *Penerapan UUPA Belum Optimal*, Jakarta, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV.

Vivin Pomantow, 2008, *Akibat Hukum Terhadap Akte Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPer*, Jurnal Lex Privatum, Vol.VI/No.7/Sept/2018, Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Wawan setiawan, 2 Juli 2011, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha*

Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah

Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT

D. WAWANCARA

MPPD Makassar Aksara Alif Raja

MPPD Makassar Khadijah Ayahrana

MPPW Sulawesi Selatan Irwan Idrus

Notaris/PPAT Almawaty Nurdin

Notaris/PPAT Liong Rahman

Notaris/PPAT Rusni Buhaerah

Notaris/PPAT Tati Selastiwati

E. INTERNET

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5910>

<https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>

<https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>

https://www.pinhome.id/blog/prosedur-jual-beli-tanah-yang-sah-sesuai-hukum/#Harus_Sudah_Disetujui_Semua_Pihak

F. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 202/PDT.G/2012/PN.MKS

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor :
76/PDT/2014/PT.MKS

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1742
K/Pdt/2015